



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 11 April 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.25 WIB s.d 15.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas evaluasi penyelenggaraan proses tender dan Membahas pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR hari ini adalah Membahas evaluasi penyelenggaraan proses tender dan Membahas pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang sampai penetapan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, utamanya penelusuran *track record* peserta lelang serta kesiapan material dan peralatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum BP2JK yang tidak profesional dalam proses penentuan pemenang lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar mengoptimalkan penerapan sistem e-katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih transparan dan akuntabel.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

Jakarta, 11 April 2023

DIRJEN BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR,



YUDHA MEDIAWAN

KETUA RAPAT,



LASARUS